



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

2025

Oleh :
**BPKAD
KABUPATEN TABALONG**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 1

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan OPD 1

1.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana 3

1.1.3. Jumlah Pegawai, PP3K dan Non ASN Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 5

1.2. Perencanaan dan Pembangunan 7

1.2.1. Visi dan Misi OPD 7

1.2.2. Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 11

1.2.3. Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 12

1.2.4. Inovasi yang dikembangkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16

1.2.5. Strategi dan Arah Kebijakan 18

1.2.6. Program Strategis Tahun 2025 23

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH 26

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN..... 50

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 50

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 50

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 50

3.4. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahannya Dibawahnya (Pemerintahan Desa) 50

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 51

4.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 51

4.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja..... 51

4.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya..... 52

4.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD 53

4.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai 53

4.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja..... 53

BAB V PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana 4

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai..... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 6

Tabel 1.4 Jumlah ASN PP3K menurut Pendidikan 6

Tabel 1.5 Jumlah Non ASN menurut Pendidikan 6

Tabel 1.6 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 6

Tabel 1.7 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun
2025 7

Tabel 1.8 Kerjasama daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 14

Tabel 1.9 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran , Strategi, dan Kebijakan 21

Tabel 1.10 Program Strategis Tahun 2025 23

Tabel 2.1 Tabel Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 27

Tabel 2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Tahun 2025 37

Tabel 2.3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD Tahun
2024-2029 37

Tabel 2.4 Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas 38

Tabel 2.5 Tanggal Penyampaian LKPD dan Opini BPK atas LKPD Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 s.d 2029..... 43

Tabel 2.6 Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca keuangan
Pemerintah Kabupaten Tahun 2024-2029..... 46

Tabel 2.7 Realisasi Capaian Nilai AKIP Tahun 2024-2029 47

Tabel 4.1 Perjanjian Kinerja 51

Tabel 4.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 52

Tabel 4.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya..... 52

Tabel 4.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Rencana
Strategis (Renstra) SKPD..... 53

Tabel 4.5 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target
Kinerja 53

Tabel 4.6 Program/Kegiatan Penunjang Indikator 1 pada Sasaran 1..... 56

Tabel 4.7 Program/Kegiatan Penunjang Indikator 2 pada Sasaran 2..... 57

Tabel 4.8 Program/Kegiatan Penunjang Indikator 3 pada Sasaran 3..... 58

Tabel 4.9 Program/Kegiatan Penunjang Indikator 4 pada Sasaran 4..... 58

Tabel 4.10 Program/Kegiatan Penunjang Indikator 1 pada Sasaran 3..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Dokumen SP2D Tahun 2024-2025 38

Gambar 2.2 Nilai Aktiva Tetap BMD Tahun 2024-2025 46

Gambar 2.3 Predikat Nilai AKIP Tahun 2024-2029 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Tabalong yang disertai tugas untuk melaksanakan kewajiban otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

.Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai:

- a. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)
- b. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.

Dalam menjalankan sebagai fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah), PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah; dan
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong untuk saat ini cukup memadai untuk dapat menunjang kelancaran tugas. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1 SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung Kantor	4	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	45	Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	55	Unit	Baik
4	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	Unit	Baik
5	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	Usul Penghapusan
6	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	11	Unit	Baik
8	Lemari Kayu	3	Unit	Baik
9	Rak Besi	39	Unit	Baik
10	Filing Cabinet Besi	14	Unit	Baik
11	Brandkas	6	Unit	Baik
12	Lemari Kaca	1	Unit	Baik
13	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	Baik
14	Papan Visual/Papan Nama	65	Unit	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	7	Unit	Baik
16	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
17	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Unit	Baik
19	Papan Nama Instansi	141	Unit	Baik
20	Papan Pengumuman	93	Unit	Baik
21	Meja Kerja Kayu	42	Unit	Baik
22	Kursi Besi/Metal	1	Unit	Baik
23	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
24	Meja 1/2 Biro	14	Unit	Baik
25	Kursi Rapat	45	Unit	Baik
26	Kursi Tamu	2	Unit	Baik
27	Kursi Biasa	78	Unit	68 Baik, 10 Usul Penghapusan
28	Kursi Lipat	40	Unit	34 Baik, 6 Usul Penghapusan
29	Meja Komputer	10	Unit	Baik
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Unit	Baik
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
32	Alat Pembersih lainnya	1	Unit	Baik
33	Lemari Es	8	Unit	Baik
34	A.C. Window	40	Unit	37 Baik, 3 Usul Penghapusan
35	Kipas Angin	3	Unit	Baik
36	Treng Air/Tandon Air	2	Unit	Baik
37	Televisi	20	Unit	18 Baik, 2 Usul Penghapusan
38	Sound System	2	Unit	Baik
39	Wireless	13	Unit	Baik
40	Camera Video	2	Unit	Baik
41	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
42	Dispenser	3	Unit	Baik
43	Karpet	3	Unit	Baik
44	Gordyin/Kray	3	Unit	Baik
45	Alat Rumah Tangga Lain-lain	165	Unit	Baik
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik

47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	16	Unit	13 Baik, 3 Usul Penghapusan
49	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Unit	Baik
50	Camera Film	3	Unit	Baik
51	Layar Film/Projector	5	Unit	4 Baik, 1 usul penghapusan
52	Telephone (PABX)	2	Unit	Baik
53	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
54	Telephone Mobile	1	Unit	Usul Penghapusan
55	Facsimile	1	Unit	Baik
56	P.C Unit	24	Unit	21 Baik, 3 Usul Penghapusan
57	Lap Top	56	Unit	51 Baik, 5 Usul Penghapusan
58	Note Book	18	Unit	5 Baik, 13 Usul Penghapusan
59	Personal Komputer lainnya	2	Unit	Baik
60	Monitor	7	Unit	5 Baik, 2 Usul Penghapusan
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	74	Unit	53 Baik, 21 Usul Penghapusan
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Baik
63	Peralatan Personal Komputer lainnya	23	Unit	13 Baik, 10 Usul Penghapusan
64	Server	7	Unit	Baik
65	Router	2	Unit	Baik
66	Hub	5	Unit	Baik
67	Wireless Access Point	17	Unit	Baik
68	Peralatan Jaringan lainnya	12	Unit	Baik
69	Peralatan Komputer lainnya	8	Unit	Baik

Sumber dari Bendahara Barang Tahun 2025

1.1.3. Jumlah Pegawai, PP3K dan Non ASN Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Keberadaan sumberdaya manusia sebagai salah satu pendukung utama di bidang pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, seperti tabel berikut:

TABEL 1.2 JUMLAH PEGAWAI

No	Uraian	Golongan									Jml
		IV	L	P	III	L	P	II	L	P	
1	Kepala	1	1								1
2	Kesekretariatan	1	1		7	2	5	1		1	9
3	Bidang Anggaran	1	1		4	3	1				4
4	Bidang Akuntansi	1	1		4	1	3				5
5	Bidang Pengelola Aset Daerah				7	6	1				7
6	Bidang Perbendaharaan	1		1	6	3	3				7
	Jumlah	5			28			1			34

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Januari 2026

TABEL 1.3 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan									
		S3		S2		S1		DIII		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala	1									
2	Kesekretariatan			1	1	1	2	1			1
3	Bidang Anggaran			1		3					
4	Bidang Akuntansi			1	2	1	1				
5	Bidang Pengelola Aset Daerah			2		2		1			
6	Bidang Perbendaharaan					2	1		2	2	
	Jumlah	1		5	3	9	4	2	2	2	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Januari 2026

TABEL 1.4 JUMLAH ASN PP3K MENURUT PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan											
		S2	L	P	S1	L	P	DIII	L	P	SLTA	L	P
1	Kesekretariatan				7	1	6						
2	Bidang Anggaran				1		1						
3	Bidang Akuntansi				5	1	4						
4	Bidang Pengelola Aset Daerah				1		1						
5	Bidang Perbendaharaan				2	1	1						
	Jumlah				15								

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Januari 2026

TABEL 1.5 JUMLAH NON ASN MENURUT PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan											
		S2	L	P	S1	L	P	DIII	L	P	SLTA	L	P
1	Kesekretariatan				2	2					4	4	
2	Bidang Anggaran												
3	Bidang Akuntansi												
4	Bidang Pengelola Aset Daerah												
5	Bidang Perbendaharaan												
	Jumlah				2						4	6	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Januari 2026

TABEL 1.6 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

No	Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	Kepala Badan	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	4
		Kepala Sub Bidang	8
		Kepala Sub Bagian	3
2	Pejabat Fungsional	Penata Laksana Barang	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1
		Jumlah	19

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai Jabatannya sebanyak 18, terdiri dari 1 orang yang telah mengikuti Diklatpim II, 3 orang yang telah mengikuti Diklatpim III dan 9 orang yang telah mengikuti mengikuti Diklatpim IV/ ADUM. Sedangkan masih terdapat 5 orang yang belum mengikuti Diklatpim, yaitu 2 orang yang belum mengikuti Diklatpim III dan 3 orang yang belum mengikuti Diklatpim IV. Untuk jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 1.7 REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2025

NO	DIKLATPIM	JUMLAH	KET
1	Diklatpim II	1 orang	
2	Diklatpim III	3 orang	2 orang (belum diklat)
3	Diklatpim IV / ADUM	9 orang	3 org Es.IV (belum)
Jumlah		13 orang	5 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Januari 2026

1.2. Perencanaan dan Pembangunan

1.2.1. Visi dan Misi OPD

Visi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengacu pada visi kabupaten Tabalong adalah:

“Tabalong Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan (Tabalong SMaRT)”

Dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui visi sebagai berikut:

1. Kabupaten Tabalong Sejahtera

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

2. Kabupaten Tabalong Maju

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur,

teknologi, dan sumber daya manusia.

3. Kabupaten Tabalong Religius

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

4. Kabupaten Tabalong Terdepan

Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, **"TABALONG SMaRT"** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan

pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah.

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Tabalong yang SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a. menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c. mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan.

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun

nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan;

- a. menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;
- b. meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c. berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu :

“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”.

Terhadap visi dan misi daerah tahun 2025-2029 tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong mendukung untuk pencapaian misi yang ke 4 yaitu:

“Menjadi Daerah Terdepan”

dan tujuan yang ke 4 yaitu:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

yang dicapai melalui sasaran kinerja ke 4.1 yaitu:

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan “

dengan indikator kinerja yaitu:

“ Opini BPK Atas Laporan Keuangan “

Mengacu pada misi, tujuan, sasaran dan indikator tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta berperan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, melalui:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dan penetapan APBD.
2. Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah dan layanan kebendaharaan sesuai peraturan perundangan.
3. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.
5. Optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja

1.2.2. Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong menetapkan kelompok sasaran utama yang menjadi fokus pelayanan dan pengelolaan. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD. Kelompok sasaran utama BPKAD meliputi:

1. Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai mitra utama dalam pengelolaan anggaran, belanja, dan aset, OPD merupakan pihak yang dilayani dalam hal penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, hingga pengelolaan barang milik daerah. BPKAD berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan pembina dalam memastikan tertib administrasi keuangan dan aset di seluruh unit kerja pemerintah daerah.

2. Pimpinan Daerah dan DPRD

Pimpinan daerah dan DPRD menjadi sasaran strategis dalam hal penyediaan data dan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Laporan keuangan yang disusun BPKAD menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat merupakan penerima manfaat tidak langsung dari pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan

akuntabel. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Eksternal

BPK, BPKP, dan Inspektorat menjadi kelompok sasaran dalam hal pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset. BPKAD bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pihak Ketiga / Swasta

Dalam konteks pemanfaatan aset dan kerja sama daerah, pihak ketiga seperti investor, penyewa aset, dan mitra swasta menjadi sasaran operasional BPKAD dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan menetapkan kelompok sasaran tersebut, BPKAD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, membangun tata kelola keuangan yang baik, dan menciptakan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tabalong.

1.2.3. Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong juga melakukan kerjasama daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kerjasama tersebut maka BPKAD beracuan pada Permendagri Nomor 16 tahun 2016 yang diubah dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Pemanfaatan Barang Milik daerah dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan Umum dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintah daerah yang itu berupa tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam rangka optimalisasi aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendorong terwujudnya kerja sama pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai guna aset yang belum termanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pemanfaatan lahan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui skema kerja sama ini, lahan milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pembangunan fasilitas umum, kawasan komersial, atau kegiatan sosial ekonomi lainnya, tanpa menghilangkan status kepemilikan aset oleh pemerintah daerah.

BPKAD berperan aktif dalam mengoordinasikan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kerja sama pemanfaatan lahan, agar berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah ada di kabupaten Tabalong berupa Sewa, Pinjam pakai dan KSP.seperti tergambar pada tabel berikut :

TABEL 1.8 KERJASAMA DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi Objek yang dikerjasamakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Jenis Kerjasama Daerah	Pelaksanaan (Tahun) 2022 -2023
1	BPKAD	PT. MSW	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Lahan	Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik	Lahan	2023 - 2024
2	BPKAD	PT. TPI	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Lahan	Pendapatan Asli Daerah	Dengan adanya teknologi untuk PLTU TPI ini maka dapat mencegah pencemaran lingkungan sehingga ramah lingkungan	Lahan	2023 - 2024
3	BPKAD	Kantor Kas Bank Kalsel	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Lahan dan Bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Memudahkan ASN dan lapisan masyarakat dalam bertransaksi	Lahan dan Bangunan	2023 - 2024
4	BPKAD	ATM Bank Kalsel Tanjung	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Lahan dan Bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Memudahkan ASN dan lapisan masyarakat dalam melakukan penarikan uang/transaksi Non Tunai dengan mudah & Praktis	Lahan dan Bangunan	2023 - 2024

5	BPKAD	ATM Bank Kalsel Banua Lawas	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Lahan dan Bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Memudahkan ASN dan lapisan masyarakat dalam melakukan penarikan uang/transaksi Non Tunai dengan mudah & Praktis	Lahan dan Bangunan	2023 - 2024
6	BPKAD	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Urusan Penunjang Bidang Urusan : Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat Tanah	target 2.070 sertifikat	Melaksanakan Percepatan Pengurusan Sertifikat Tanah milik Pemerintah Kab. Tabalong	Sertifikat Tanah	2022 - 2023

1.2.4. Inovasi yang dikembangkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2025, Inovasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah:

a. MASBATA

Masbata merupakan Sistem Informasi yang mengelola administrasi manajemen stok barang daerah Kabupaten Tabalong, meliputi Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan. Aplikasi ini digunakan sebagai salah satu sumber data pengelolaan aset daerah Kabupaten Tabalong

b. SIGAP TABALONG

SIGAP TABALONG atau Sistem Informasi Geografis Aset Pemerintah Tabalong merupakan Sistem Informasi yang mengelola data geografis daerah Kabupaten Tabalong, meliputi Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan. Aplikasi ini digunakan sebagai salah satu sumber data pengelolaan aset daerah Kabupaten Tabalong

c. PERMEN TABALONG

PERMEN TABALONG atau Peralatan dan Mesin Tabalong merupakan Sistem Informasi yang mengelola administrasi manajemen peralatan dan mesin daerah Kabupaten Tabalong, meliputi Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan. Aplikasi ini digunakan sebagai salah satu sumber data pengelolaan aset daerah Kabupaten Tabalong.

d. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong tentang terkait dengan aset daerah.

e. SIP2KB (Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Sistem Informasi ini dirancang untuk memudahkan semua perangkat daerah dalam mengetahui dan memantau keberadaan kendaraan bermotor yang berada dalam pengelolaannya, juga untuk mengetahui seberapa besar biaya

pemeliharaan yang sudah dikeluarkan baik data per unit maupun data secara keseluruhan dari kendaraan bermotor tersebut

f. PIKAD (Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah)

Proses menilai dan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja perangkat daerah menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga dapat diketahui Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menilai sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dan kualitas Implementasi pelaksanaan anggaran secara obyektif.

g. SIANGAH (Sistem Informasi Konsultasi Evaluasi Anggaran Daerah)

Inovasi ini untuk memudahkan perangkat daerah dalam berkonsultasi masalah anggaran tidak harus datang ke kantor BPKAD bidang anggaran.

h. Smart BMD Tabalong (Sistem Modernisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong)

Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data BMD secara real-time serta mendukung pelaporan aset yang lebih cepat dan tepat. Aplikasi ini juga menjadi Solusi integratif dalam mendukung sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

i. Smart SPM

Inovasi ini digunakan untuk mempermudah dalam pengajuan SPP/SPM melalui Aplikasi, dimana perangkat Daerah tidak lagi datang ke Kantor BPKAD bidang Perbendaharaan untuk menyerahkan SPP/SPM

j. Gelora (Pengelolaan Perjalanan Dinas)

Aplikasi Pengelolaan Perjalanan Dinas berbasis website merupakan sistem terintegrasi yang mendukung proses administrasi perjalanan dinas secara menyeluruh, mulai dari pembuatan Nota Dinas, Surat Tugas, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), hingga penyusunan kwitansi dan

rincian biaya perjalanan dinas. Aplikasi ini juga menyediakan fitur rekapitulasi perjalanan dinas per sub kegiatan dan per Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) yang disusun sesuai format yang diminta oleh BPK, sehingga memudahkan proses pemeriksaan, monitoring, pengendalian anggaran, serta penyusunan laporan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

k. Membuat Sistem Alert Melalui WhatsApp Broadcast List Terkait Program Peningkatan Nilai IP ASN

merupakan Sistem yang menjadi sumber informasi terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan dan seminar yang dapat meningkatkan nilai IP ASN Pegawai pada BPKAD, Fitur WhatsApp Broadcast List digunakan sebagai salah satu sumber pengkomunikasian informasi antar pegawai terkait kegiatan peningkatan nilai IP ASN.

1.2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun selama periode 2024-2029 tersebut, maka Strategi dan Kebijakan sesuai Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dengan mengacu pada misi ke-4 pada RPJMD yaitu Menjadi Daerah Terdepan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, dan akuntabel**
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah**
- Indikator : Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)**
- Strategi :**
 - a. Koordinasi dengan SKPD terhadap kelengkapan data anggaran yang tepat waktu.
 - b. Koordinasi dengan Bappeda terhadap konsistensi data penganggaran SKPD.
- Kebijakan :**
 - a. Meningkatkan kesesuaian penyusunan dan pembahasan RKA dan DPA dengan kesepakatan KUA dan PPAS dan persetujuan Raperda sesuai ketentuan berlaku.
 - b. Meningkatkan konsistensi data KUA / PPAS terhadap RAPBD.

Sasaran 2	: Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
Indikator	: Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas (%)
Strategi	: Optimalisasi kinerja pelayanan perbendaharaan dan penatausahaan terhadap pengelolaan keuangan daerah
Kebijakan	: Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan secara konsisten, efisien, efektif dan inovatif.
Sasaran 3	: Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator	: Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan Sesuai SAP (%)
Strategi	: a. Peningkatan kualitas SDM SKPD dan SKPKD melalui Bimbingan Teknis dan Diklat. b. Optimalisasi Proses Penyusunan Laporan Keuangan dengan kegiatan Rekonsiliasi
Kebijakan	: a. Melaksanakan dan mengikuti Bimbingan Teknis dan Diklat b. Melaksanakan Rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi untuk menyusun laporan Keuangan
Sasaran 4	: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator	: Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD (Persentase)
Strategi	: a. Peningkatan kualitas SDM pengurus barang b. Melaksanakan rekonsiliasi BMD setiap bulan c. Monitoring pelaksanaan pengelolaan BMD kepada masing-masing SKPD.
Kebijakan	: a. Mendorong dan melaksanakan tertib pengelolaan tata usaha aset terhadap entitas dan konsolidasian. b. Melaksanakan pembinaan kepada Pengurus Barang, c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam peningkatan pengelolaan aset daerah.
Sasaran 5	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Perangkat Daerah”

- Indikator : Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)
- Strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi internal SKPD
 - b. Tindak lanjut dan pembenahan rencana aksi daerah sesuai dengan rekomendasi auditor dan peraturan perundangan yang berlaku
- Kebijakan :
 - a. Pengembangan teknologi informasi badan pengelola keuangan dan aset daerah
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan SKPD
 - c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusiaOpimalisasi pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan berlaku

Dalam bentuk tabel keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis 2025-2029 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 1.9 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN , STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI RPJMD: “TABALONG SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN (TABALONG SMarT)”				
MISI Ke 4 RPJMD: “MENJADI DAERAH TERDEPAN”				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	1. Koordinasi dengan SKPD terhadap kelengkapan data anggaran yang tepat waktu 2. Koordinasi dengan Bappeda terhadap konsistensi data penganggaran SKPD	1. Meningkatkan konsistensi penyusunan dan pembahasan RKA dan DPA dengan kesepakatan KUA & PPAS dan persetujuan Raperda serta ketentuan yang berlaku 2. Meningkatkan konsistensi data KUA/PPAS terhadap RAPBD.
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas (%)	Optimalisasi kinerja pelayanan perbendaharaan dan penatausahaan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan secara konsisten, efisien, efektif dan inovatif
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan Sesuai SAP (%)	1. Peningkatan kualitas SDM SKPD dan SKPKD melalui Bimbingan Teknis dan Diklat. 2. Optimalisasi Proses Penyusunan Laporan Keuangan dengan kegiatan Rekonsiliasi	1. Melaksanakan dan mengikuti Bimbingan Teknis dan Diklat 2. Melaksanakan Rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi untuk menyusun laporan Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD (Persentase)kabupaten	1. Peningkatan kualitas SDM pengurus barang 2. Melaksanakan rekonsiliasi BMD setiap bulan 3. Monitoring pelaksanaan pengelolaan BMD kepada masing-masing SKPD.	1. Mendorong dan melaksanakan tertib pengelolaan tata usaha aset terhadap entitas dan konsolidasian. 2. Melaksanakan pembinaan kepada Pengurus Barang, 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam peningkatan pengelolaan aset daerah.
	Meningkatnya Kualitas Tata	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan	1. Pengembangan teknologi informasi badan pengelola keuangan dan aset daerah 2. Peningkatan kualitas pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”	(Predikat)	sinergi internal SKPD 2. Tindak lanjut dan pembenahan rencana aksi daerah sesuai dengan rekomendasi auditor dan peraturan perundangan yang berlaku	3. Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia 4. Opimalisasi pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan berlaku

1.2.6. Program Strategis Tahun 2025

TABEL 1.10 PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.952.046.694
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.625.990
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.707.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.579.870
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.338.320
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.761416.100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.751.119.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.297.100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	497.070.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	97.070.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas & Fungsi	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.635.414.074
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.570.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.140.036,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.433.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	97.063.638
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.135.207.400
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.605.128.412
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.484.995.712
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.120.132.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.565.700.886
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.740.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.360.386
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.941.260
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.170.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.140.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.631.260
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	835.016.208
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.260.920
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	37.665.920
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	77.360.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	243.103.220
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	151.426.148
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	131.200.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	265.995.458
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.601.990,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.023.660,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.769.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.561.911,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.930.136,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.108.461,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	536.547.098
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	152.411.140,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88.030.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.176.000,00
	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	26.468.000,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	159.461.958,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	390.662.367.703
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PemDa	6.379.909.708
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	349.932.121.000
	'Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.032.282.978
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.871.654.017
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	20.446.400.000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.401.800.200
	Penyusunan Standar Harga	76.925.800,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	237.123.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	355.771.670
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	340.949.930
	Pengamanan Barang Milik Daerah	747.337.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	Penilaian Barang Milik Daerah	76.748.000,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	566.944.800,00
	J U M L A H	

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan LKPJ. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan wujud pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara umum, program dan kegiatan BPKAD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, dengan capaian kinerja yang terukur berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan. Capaian tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta alokasi dan realisasi anggaran pada tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Rincian capaian pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD, yang memuat nama program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan realisasi, realisasi anggaran, serta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 2.1 TABEL CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah			51.635.296.722	A	40.908.623.003		Sekretariat sebagai Penunjang dan berdasarkan Pertanggungjawaban dimana sebagai fasilitator dari bidang	Akan dikoordinasikan kembali belanja bidang ke bidang masing-masing
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	90.625.990	100	43.354.300,00	100	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	27.707.800	1	12.088.800,00	1	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	19.579.870	1	13.110.100,00	1	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	35.338.320	2	14.987.500,00	2	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	1	2.652.000,00	1	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.000.000	1	515.900,00	1	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	12.761416.100	3 Lap	8.453.495.279,00	3 Lap	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	12.751.119.000	50 Org	8.447.001.679,00	50 Org	Adanya Mutasi ketempat lain	Akan dikoordinasikan untuk penambahan ASN
					Koordinasi dan	Jumlah Laporan	10.297.100	3 Lap	6.493.600,00	3 Lap	Tingginya harga	Akan

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu					satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	497.070.000	100%	181.365.000,00	100%	Tidak terealisasinya perjalanan dinas dan honor narasumber	Akan dikoordinasikn
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	97.070.000,00	1 Paket	81.435.000,00	1 paket	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan untuk penambahan anggaran
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	7 Org	12.500.000,00	7 Org	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan kembali kepada pelaksana kegiatan
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	300.000.000	56 Orang	87.430.000,00	56	Adanya honor Narasumber yang tidak dibayarkan karena tidak dilaksanakan dalam acara tersebut	Akan dikoordinasikan kembali kepada pelaksana kegiatan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	1.635.414.074	100%	1.378.504.677,00	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.570.000	3 Paket	29.770.000,00	3 Paket	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	245.140.036,00	4 Paket	187.797.000,00	4 Paket	Masih adanya stock opname tahun lalu sehingga tidak direaliassikan	diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	107.433.000	4 Paket	45.225.000,00	4 Paket	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	97.063.638	12 Bulan	83.336.000,00	12 Bulan	Belum terealisasi iklan tidak sepenuhnya	diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	1.135.207.400	4 Laporan	1.032.376.677,00	4 Laporan	Target untuk perjalanan luar provinsi dipergunakan untuk perjalanan dalam provinsi saja.	Agar lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah.
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	33.605.128.412,00	100%	29.221.142.641,00	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	32.484.995.712	-	28.368.855.102,00	-	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1.120.132.700	20 Item	852.287.539,00	20 Item	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	1.565.700.886,00	100%	945.103.795,00	100%	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	9.740.500	2 Laporan	9.500.000,00	905 Lbr		Diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	412.600.000	12 Laporan	291.139.956,00	48 Rek Bulan		Diharapkan belanja lebih selektif lagi
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.143.360.386	12 Laporan	644.463.839,00	12 Bulan	Tingginya harga satuan sehingga ada yang tidak dapat direalisasikan	Akan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Satuan harga
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	1.479.941.260,00	100%	685.657.311,00	100%	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
												anggaran kegiatannya
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya n	781.170.000	38 Unit	263.879.450,00	38 Unit	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336.140.000	12	62.747.920,00	12	Belanja service tidak direalisasikan sepenuhnya	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	362.631.260	1 Buah	359.029.941,00	1 Buah		
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD tepat waktu			835.014.208	100%	505.852.113	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
				Persentase Penatausahaan keuangan yang berkualitas			365.352.735.734	100%	365.262.599.852	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
				Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP			536.547.098	100%	410.403.706	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan	835.014.208	100 Dok	505.852.113	100 Dok	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
						KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD						memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	194.260.920,00	2 Dok	179.659.613,00	2 Dok	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	umlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	37.665.920,00	2 Dok	24.642.100,00	2 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	77.360.000,00	46 Dok	47.900.000,00	46 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	-		-			
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Prnjabaran APBD	243.103.220,00	2 Dok	61.832.400,00	2 Dok	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	151.424.148,00	2 Dok	110.893.000,00	2 Dok	Belanja cetak dan penggandaan buku tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	131.200.000,00	100%	80.925.000,00	100%	Perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota						memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan dan Pencairan SP2D dan Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	998.967.622	100	253.774.487	100	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
						Terlaksananya Pengelolaan Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	390.662.367.703,19	100	365.086.740.689	100		
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		12 Lap		12 Lap	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
							51.601.769,00		47.329.270,00			
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		100%		100%	Keterbatasan waktu,dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
							4.023.660,00		913.200,00			
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		12 Lap		12 Lap	Belanja perjalanan dinas tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
							47.769.273,00		47.075.300,00			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	umlah Laporan RealisasiPenerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ke tiga		24 Dok		24 Dok	Masih ada belanja yang tidak direalisasikan dan Keterbatasan waktu,dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
							32.561.911,00		500.000,00			

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)						
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	umlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.930.078,00	12 Dok	18.938.610,00	12 Dok	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.108.354,00	100%	61.102.783,00	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemda	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	6.379.909.708,00	1	2.830.238.390,00	1		
					Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya 'Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.032.282.978,00	1	0,00	1		
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (PPKD)	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	349.932.121.000,00	1	340.277.002.299,00	1		
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (PPKD)	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	12.871.654.017,19	1	1.533.100.000,00	1		
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (PPKD)	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	20.446.400.000,00	1	20.446.400.000,00	1		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah	536.547.098	100%	410.403.706	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Keuangan Daerah	Daerah, Raperda dan Raperrbup Pertanggungwaban APBD						memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kwajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	152.411.140,00	12 Lap	146.675.481,00	12 Lap	Adanya belanja yang tidak direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	88.030.000,00	2 Dok	34.463.300,00	2 Dok	Belanja makan minum rapat tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.176.000,00	2 Dok	88.836.940,00	2 Dok	Belanja honor narasumber tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.468.000,00	1 Dok	21.650.000,00	1 Dok		
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah/Kota	159.461.958,00	82 Org	118.777.985,00	82 Org	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Meningkatkan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.401.800.200	100%	1.536.175.494	100%	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	76.925.800,00	1	31.077.700,00	1	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	237.123.000,00	4	120.857.700,00	4	Belanja perjalanan dinas tidak semuanya direalisasikan	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	355.771.670,00	41	238.397.483,00	41	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Melakukan pembinaan kepada semua pengurus barang SKPD
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	340.949.930,00	41	53.682.260,00	41	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Melakukan pembinaan kepada semua pengurus barang SKPD
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	747.337.000,00	1	568.987.956,00	1	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	76.748.000,00	5	29.382.700,00	5	Keterbatasan waktu,dan kekurangan SDM bidang Ase	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Indikator Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	566.944.800	10	493.789.695,00	10	Adanya belanja yang tidak direalisasikan semua	Diharapkan PPTK agar lebih memaksimalkan serapan anggaran kegiatannya
							446.337.023.389		408.623.654.168			

2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

TABEL 2.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Catatan Strategis	Rekomendasi	Tanggapan/Tindak Lanjut
- Kegiatan pengelolaan aset daerah perlu dilakukan dengan cermat baik kegiatan penatausahaannya, pemanfaatannya,serta upaya pengawasan untuk pengamanan aset daerah.-	- Pemanfaatan aset yang memiliki nilai profit perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian dalam penilaian aset tersebut sesuai kondisi terkini salah satu contoh aset yang dipinjam pakai oleh PT MSW dan PT TPI. - Dalam upaya mengamankan aset harus dilakukan kegiatan sertifikasi secara menyeluruh. - Aset-aset yang belum termanfaatkan sesegeranya dilakukan kajian untuk ditingkatkan pengelolaannya agar mendapatkan PAD.	- BPKAD dalam hal ini Bidang pengelolaan aset Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah baik terkait pemanfaatan aset dan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Tabalong -

2.3. Capaian Makro atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Secara makro program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Penganggaran keuangan Daerah
Indikator 1	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3 PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPBD TAHUN 2024-2029

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Ketepatan Waktu Penyampaian KUA - PPAS, RAPBD, dan Perda APBD Induk dan Perubahan	100	100				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Tabalong telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 bahwa penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Indikator Persentase Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 6. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian dari indikator kinerja Persentase ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD yaitu dengan formulasi sebagai berikut:

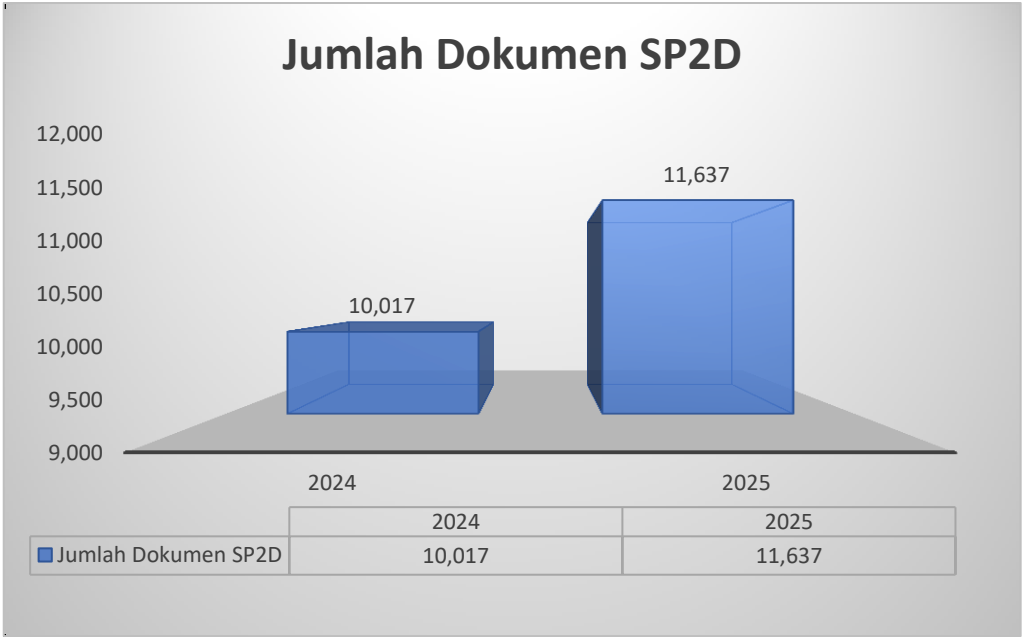
$$\frac{\text{Realisasi Tanggal Penetapan APBD}}{\text{Target Tanggal Penetapan APBD}} \times 100\%$$

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
Indikator 2	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas

Dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4 PERSENTASE PENATAUSAHAAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase waktu penyelesaian SP2D	100%	100%				
2.	Jumlah dokumen SP2D	10.017	11.637				



GAMBAR 2.1 JUMLAH DOKUMEN SP2D TAHUN 2024-2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149, dinyatakan bahwa:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
2. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
3. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
4. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
5. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM

Dalam menunjang Indikator Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu, dialokasikan dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Capaian dari indikator kinerja Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen/Transaksi Perbendaharaan yang sesuai ketentuan}}{\text{Total Dokumen Transaksi Perbendaharaan yang di periksa}} \times 100\%$$

Di dalam Penatausahaan Keuangan yang berkualitas juga mempunyai peranan di Terlaksananya penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah di mana ini menjelaskan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, ditandai dengan terselenggaranya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah sesuai ketentuan, Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi, Analisis Perencanaan & Penyaluran Bantuan Keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak, serta terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ini ada 121 Desa dengan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten kepada Desa (Bantuan Keuangan ADD) dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah/Desa. Dengan adanya ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola bantuan keuangan kabupaten, meminimalisir potensi penyalahgunaan, serta memastikan manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator 3	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong merupakan gabungan laporan keuangan Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah syarat normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. (Paragraf 32 Lampiran II Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan kriteria agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu:

1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan memiliki:
 - a. Manfaat umpan balik;
 - b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
 - c. Memiliki manfaat prediktif informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - d. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan
 - e. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik:
 - a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
 - c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu;

- d. Dapat dibandingkan, dapat dibandingkan artinya informasi dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan; dan
- e. Dapat dipahami, laporan keuangan maksudnya dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193 menyebutkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari proses rekonsiliasi dengan seluruh Perangkat Daerah sampai dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 91 hari kalender dimulai dari 01 Januari sampai dengan 31 Maret.

Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk tahun anggaran 2025 masih dalam proses. Dengan diperolehnya Opini WTP, sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong telah memenuhi:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektifitas system pengendalian internal; dan
- d. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar akan menciptakan efesiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan belanja, meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sehingga dapat dicapai ketepatan waktu dalam penyampaian dan penetapan APBD, APBD-P, penyampaian laporan keuangan dan penyampaian serta penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehingga dapat dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.5 TANGGAL PENYAMPAIAN LKPD DAN OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 S.D 2029

No	Tahun	Tanggal Penyampaian	Opini BPK
1.	2023	10 Maret 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2024	23 Mei 2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2025		
4.	2026		
5.	2027		
6.	2028		
7.	2029		

Dengan capaian ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis AkruaI akan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun para pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Untuk meningkatkan Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dengan Sub Kegiatan berikut:

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Capaian dari indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tanggal Penyampaian LKPD}}{\text{Target Tanggal Penyampaian LKPD}} \times 100\%$$

asasan 4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Indikator 4	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam mengelola aset daerah harus sesuai dengan siklus penatausahaan aset daerah yang meliputi:

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- Proses pengadaan barang milik daerah;
- Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
- Penetapan pengguna barang milik daerah;
- Penatausahaan barang milik daerah;
- Pemanfaatan barang milik daerah.

Dalam rangka menjaga keakuratan dan keandalan data Barang Milik Daerah (BMD) yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Neraca Pemerintah Daerah, BPKAD telah melakukan rekonsiliasi data barang milik daerah (BMD) pada minggu ke II bulan Januari sampai dengan minggu ke I bulan Februari yang bertujuan agar penyajian nilai aset pada laporan keuangan disajikan secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi BMD juga dimaksudkan untuk menyamakan perbedaan pencatatan antara laporan realisasi anggaran dengan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi data BMD tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi data BMD.

Dokumen sumber yang digunakan dalam Rekonsiliasi Data BMD paling sedikit berupa:

- Laporan Barang Pengguna;
- Neraca/ Laporan Keuangan SKPD;
- Dokumen Transaksi BMD; dan
- Dokumen Pengelolaan BMD.

Rekonsiliasi data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Terdiri atas :

- Rekonsiliasi saldo awal;
- Rekonsiliasi data transaksi periode berjalan; dan
- Rekonsiliasi pengelolaan BMD.

Proses rekonsiliasi secara garis besarnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengecekan Saldo Awal Neraca yang telah diaudit BPK tahun lalu;
- b. Pengecekan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada masing-masing SKPD, dengan melihat LRA maka akan diketahui belanja modal apa saja yang sudah dilaksanakan, selain itu juga untuk memastikan apakah ada pengurangan dan penambahan aset; dan
- c. Penyusunan kertas kerja beserta lampirannya.
- d. Semua riwayat penambahan dan pengurangan (mutasi) barang akan dimasukan ke dalam kertas kerja beserta lampirannya, dengan rincian berupa komponen penambah aset dan komponen pengurang aset.

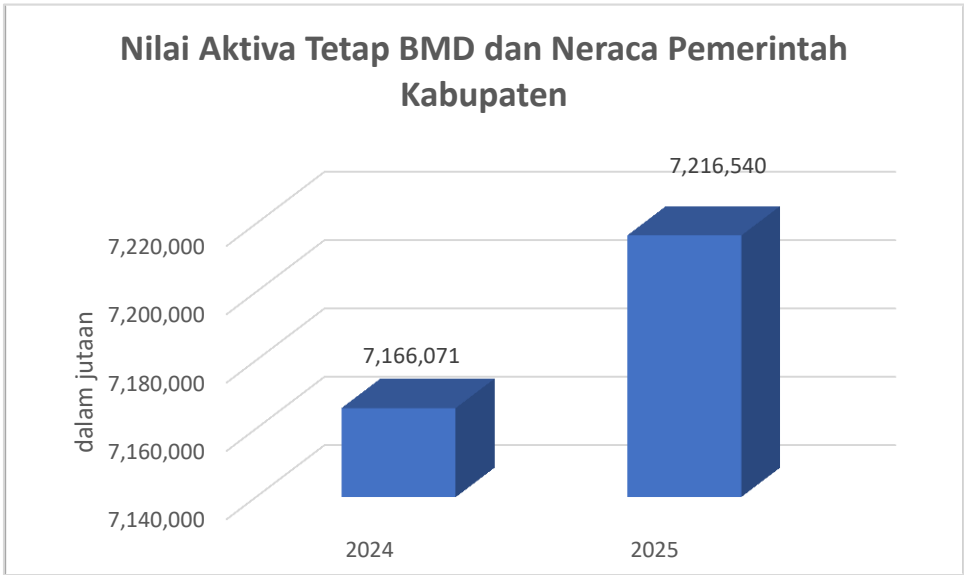
Untuk setiap Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya yaitu setiap Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan pelaporan dengan membuat kertas kerja, neraca, Kartu Inventaris Ruangan, Kartu Inventaris Barang dan *Stock Of Name* barang pakai habis.

Rekonsiliasi antara bidang aset dan akuntansi dilaksanakan setiap bulan berjalan untuk mengetahui realisasi belanja modal. Sedangkan rekonsiliasi antara bidang aset dan SKPD dilaksanakan tiap bulan juga untuk mengetahui mutasi tambah/kurang baik dari belanja modal, belanja pegawai, mutasi antar SKPD dan koreksi catat. Untuk memverifikasi laporan aset pada setiap SKPD dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi dengan bidang aset dan akuntansi setiap bulan yang dituangkan dalam kertas kerja.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi barang yang secara kontinyu dilaksanakan terhadap seluruh Pemegang Barang pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan demikian diharapkan kesesuaian data antara nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten bisa sama seluruhnya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.6 PERSENTASE KESESUAIAN NILAI AKTIVA TETAP BMD DENGAN NERACA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2024-2029

No	Uraian			Tahun Anggaran			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Ketepatan waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%	100%				
2.	Nilai Aktiva Tetap BMD dan Neraca Pemerintah Kabupaten	7.166.071.029,066,76	7.216.539.896,575,68				



GAMBAR 2.2 NILAI AKTIVA TETAP BMD TAHUN 2024-2025

Untuk meningkatkan Prosentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan neraca keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di kelola oleh Bidang Pengelola Aset Daerah dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong mengupayakan untuk Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD tepat waktu Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah seluruh Laporan yang Wajib disampaikan}} \times 100$$

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Indikator 5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

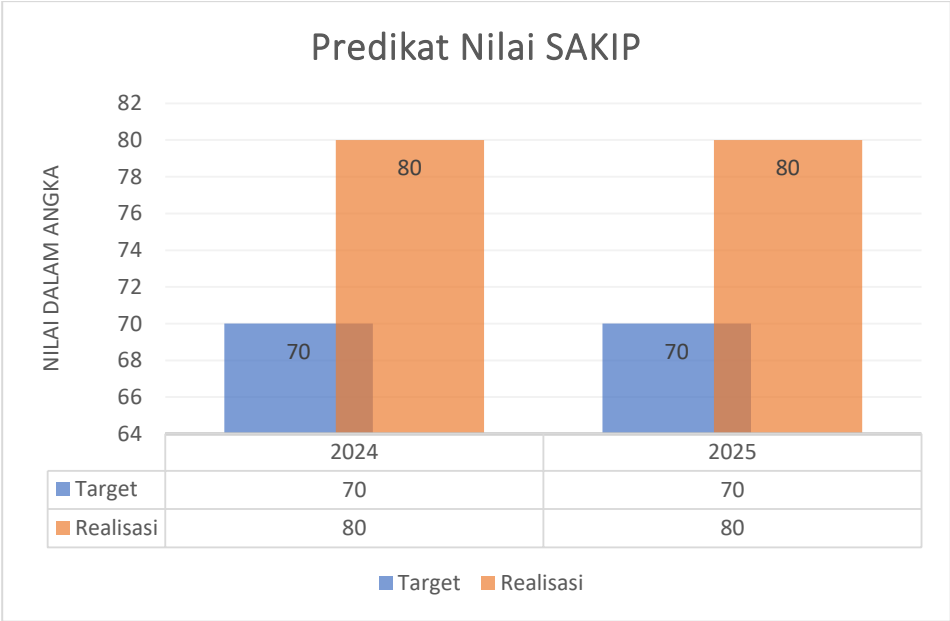
Target predikat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sudah tercapai karena sudah dilaksanakan evaluasi/penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluai AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan yang diperkuat dengan komitmen dari semua bidang untuk melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Realisasi capaian nilai evaluasi AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.7 REALISASI CAPAIAN NILAI AKIP TAHUN 2024-2029

No	Uraian	Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Predikat Nilai AKIP	A	A				



GAMBAR 2.3 PREDIKAT NILAI AKIP TAHUN 2024-2029

Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah kategori “A” dan sudah dilaksanakan reviu dan penilaian terhadap komponen pelaporan AKIP BPKAD oleh Inspektorat.

Untuk memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tidak ada

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

3.4. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahannya Dibawahnya (Pemerintahan Desa)

Tidak ada

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

4.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi seperti tabel berikut:

TABEL 4.1 PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A
2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%

4.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

TABEL 4.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			2025	2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	Capaian nilai SAKIP BPKAD adalah Memuaskan (A)
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%	Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%	SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah dan kemudian diterbitkan sebanyak 11.637
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP			Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) telah disesuaikan dan diserahkan ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Maret 2025, sedangkan untuk Laporan Keuangan (Audited) tanggal 23 Mei 2025
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100	100	Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp 7.216.539.896.575,68

4.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

TABEL 4.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
			2025	2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	100%	100% 10.017 dokumen
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP	100%	100% 04 Maret 2023
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100% 7.216.539.896.575,68	100% Rp.7.166.071.029.066,76

4.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD

TABEL 4.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian Kinerja
				2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP	100%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%	100%

4.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Bahwa penyerapan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong masih belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan realisasi keuangan pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 34.315.486.709,00 atau 73,03%. Kondisi sisa anggaran sebesar Rp 12.671.152.702 Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, juga diakibatkan karena ada beberapa kegiatan yang serapan kurang maksimal.

4.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

TABEL 4.5 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.260.920,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	37.665.920,00
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	77.360.000,00
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	243.103.220,00
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	151.424.148,00
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	131.200.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.601.769,00
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.023.660,00
					Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.769.273,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	32.561.911,00
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.930.078,00
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.108.354,00
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PemDa	6.379.909.708,00
					Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.032.282.978,00
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (PPKD)	349.932.121.000,00
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (PPKD)	12.871.654.017,19
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (PPKD)	20.446.400.000,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	152.411.140,00
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88.030.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	110.176.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.468.000,00
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	159.461.958,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	76.925.800,00
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	237.123.000,00
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	355.771.670,00
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	340.949.930,00
					Pengamanan Barang Milik Daerah	747.337.000,00
					Penilaian Barang Milik Daerah	76.748.000,00
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	566.944.800
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.707.800
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.579.870
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.338.320
					Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.000.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.751.119.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.297.100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.070.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.570.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.140.036,00
					Penyediaan Barang	107.433.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
					Cetakan dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	97.063.638
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.135.207.400
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.484.995.712
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.120.132.700
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.740.500
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.600.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.360.386
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.170.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.140.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.631.260
	J u m l a h					446.337.020.976

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas Penganggaran Keuangan Daerah
Indikator 1	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu

TABEL 4.6 PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR 1 PADA SASARAN 1

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.260.920,00	179.659.613,00	92,48%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	37.665.920,00	24.642.100,00	65,42%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	77.360.000,00	47.900.000,00	61,92%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			25,43%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	243.103.220,00	61.832.400,00	73,23%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	151.424.148,00	110.893.000,00	61,68%

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	131.200.000,00	80.925.000,00	81,60
Jumlah		835.014.208	505.852.113	60,58

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
Indikator 2	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas

TABEL 4.7 PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR 2 PADA SASARAN 2

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.601.769,00	47.329.270,00	91,72%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.023.660,00	913.200,00	22,70%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.769.273,00	47.075.300,00	98,55%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	32.561.911,00	500.000,00	1,54%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.930.078,00	18.938.610,00	32,14%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.108.354,00	61.102.783,00	85,93%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PemDa	6.379.909.708,00	2.830.238.390,00	44,36%
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.032.282.978,00	0,00	0,00%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (PPKD)	349.932.121.000,00	340.277.002.299,00	97,24%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (PPKD)	12.871.654.017,19	1.533.100.000,00	11,91%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (PPKD)	20.446.400.000,00	20.446.400.000,00	100,00%
Jumlah		390.928.362.748	365.262.599.852	93,43%

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator 3	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan sesuai SAP

TABEL 4.8 PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR 3 PADA SASARAN 3

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	152.411.140,00	146.675.481,00	96,24%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88.030.000,00	34.463.300,00	39,15%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.176.000,00	88.836.940,00	80,63%
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.468.000,00	21.650.000,00	81,80%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	159.461.958,00	118.777.985,00	74,49%
Jumlah		536.547.098,00	410.403.706,00	76,49%

Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Indikator 4	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD

TABEL 4.9 PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR 4 PADA SASARAN 4

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	76.925.800,00	31.077.700,00	40,40%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	237.123.000,00	120.857.700,00	50,97%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	355.771.670,00	238.397.483,00	67,01%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	340.949.930,00	53.682.260,00	15,74%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	747.337.000,00	568.987.956,00	76,14%
	Penilaian Barang Milik Daerah	76.748.000,00	29.382.700,00	38,28%
	Optimalisasi Penggunaan,	566.944.800,00	493.789.695,00	87,10%

	Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Jumlah		2.401.800.200	1.536.175.494	63,96%

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah
Indikator 5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

TABEL 4.10 PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR 1 PADA SASARAN 3

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.707.800,00	12.088.800,00	43,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.579.870,00	13.110.100,00	66,96%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.338.320,00	14.987.500,00	42,41%
	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.000.000,00	515.900,00	17,20%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	2.652.000,00	53,04%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.751.119.000,00	8.447.001.679,00	66,25%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.297.100,00	6.493.600,00	63,06%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.070.000,00	81.435.000,00	83,89%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	12.500.000,00	12,50%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	87.430.000,00	29,14%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.570.000,00	29.770.000,00	58,87%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.140.036,00	187.797.000,00	76,61%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.433.000,00	45.225.000,00	42,10%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	97.063.638,00	83.336.000,00	85,86%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.135.207.400,00	1.032.376.677,00	90,94%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.484.995.712,00	28.368.855.102,00	87,33%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.120.132.700,00	852.287.539,00	76,09%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.740.500,00	9.500.000,00	97,53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.600.000,00	291.139.956,00	70,56%

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.360.386,00	644.463.839,00	56,37%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.170.000,00	263.879.450,00	33,78%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.140.000,00	62.747.920,00	18,67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.631.260,00	359.029.941,00	99,01%
Jumlah		51.635.296.722	40.908.623.003	79,23

BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu satu tahun. LKPj ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun anggaran 2025 seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 446.337.023.389 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan realisasi dana sebesar Rp. 408.623.654.168 (*Empat Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*). Hal ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai dengan maksimal apabila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama oleh semua aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. LKPj ini disusun sedemikian rupa dan hasil pencapaiannya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan LKPj ini. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Januari 2026

Kepala Badan



Dr. H. HUSIN ANSARI, SE,ME
NIP. 19800610 200501 1 014